

# LAPORAN TRIWULAN I

PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



20  
25



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Triwulan I Tahun Anggaran 2025* dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini berisi informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai rencana.

Harapan kami, laporan monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan yang berharga dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan maupun kendala dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Selain itu, semoga laporan ini juga dapat mendukung pengembangan sistem pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada masa mendatang.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum,



Reni Ahianti  
NIP.196910181996032002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	4
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
<b>BAB II: PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM .....</b>	<b>5</b>
2.1 KEBIJAKAN INTERNAL TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI UU KIP DI TAHUN 2025 .....	5
2.2 KEGIATAN INTERNAL TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI UU KIP PADA TAHUN 2025 .....	6
2.3 REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 .....	11
2.4 REKAPITULASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK.....	12
2.5 KONDISI LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
2.6 UPAYA INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	15
2.7 SURVEI LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	17
<b>BAB III: KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI.....</b>	<b>19</b>
3.1 KENDALA LAYANAN INFORMASI LINGKUP UNIT ORGANISASI DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM.....	19
3.2 KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI LINGKUP UNIT KERJA .....	19
<b>BAB IV: REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI .....</b>	<b>20</b>
4.1 REKOMENDASI .....	20
4.2 TINDAK LANJUT .....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi juga menjadi sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun Badan Publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Badan Publik memiliki kewajiban membuka akses informasi bagi masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

Melalui prinsip keterbukaan, Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Sejak tahun 2015, Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian PUPR, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik serta pengelolaan struktur organisasi PPID.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan laporan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini memiliki maksud untuk mendokumentasikan pelaksanaan kewajiban Badan Publik dalam memberikan layanan informasi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Adapun tujuan laporan ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
2. Menjadi sarana evaluasi dan monitoring atas kinerja layanan informasi publik.
3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**

#### **2.1 Kebijakan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP di Tahun 2025**

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan internal yang memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penetapan standar layanan informasi publik. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penajaman dan memperkaya informasi pada 3 (tiga) klasifikasi informasi di lingkungan Pekerjaan Umum yang telah disusun sejak tahun 2015 yaitu :

- Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Sebagai upaya penguatan PPID tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga terus melakukan sosialisasi atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pekerjaan Umum.

2.1.1 Adapun beberapa kebijakan internal yang merupakan implementasi UU KIP Tahun 2025 adalah:

1. Telah terdapat SK PPID DJPI Nomor 56/KPTS/Dp/2024 Tahun 2024 Tahun 2024 Pembentukan TIM Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Telah terdapat SK SP4N Lapor di lingkungan DJPI Nomor 79/KPTS/Dp/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
3. Telah terdapat SK PIC pengelolaan Aplikasi Nomor 10 /KPTS/Ps/2024 Tahun 2024 Pembentukan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

4. Telah terdapat SK Standar Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Perumahan Nomor 10/KPTS/PS/2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
5. Telah terdapat SOP Sistem informasi Aplikasi Pengaduan dan SOP Peliputan dan Penayangan Informasi pada Media Sosial

## 2.2 Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP pada Tahun 2025

- Pengelolaan Website dan Media Sosial

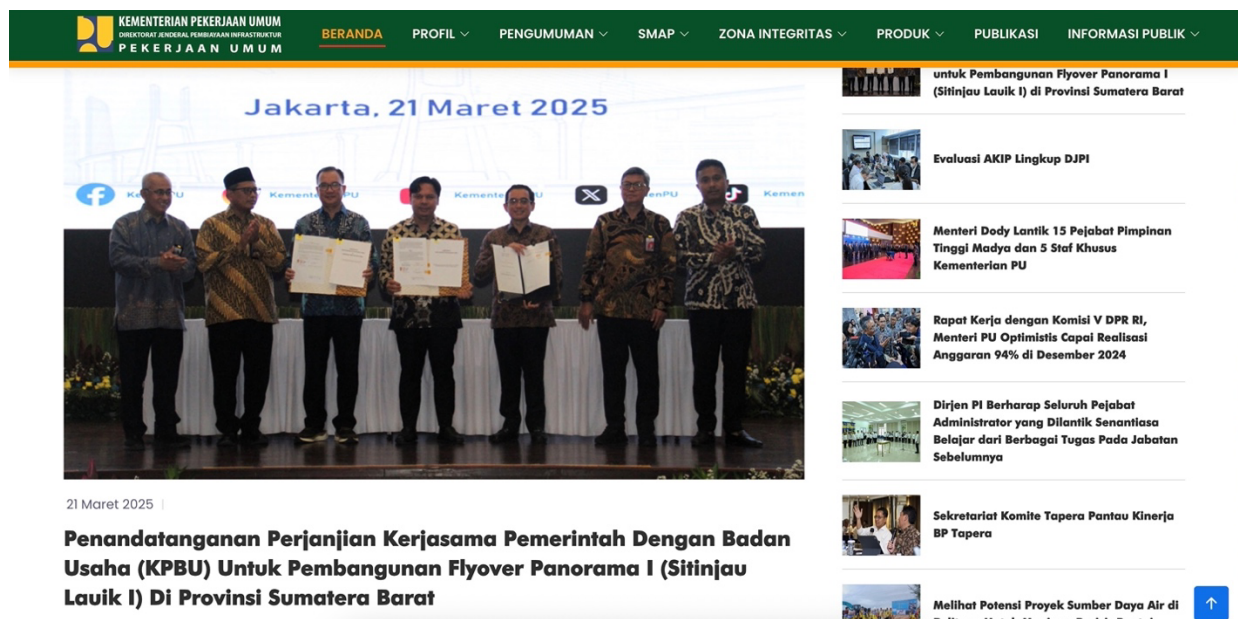
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki **website resmi** yang terintegrasi dengan portal Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu melalui alamat pembiayaan.pu.go.id.

Melalui website ini, DJPI menyampaikan berbagai informasi terkait:

- Profil organisasi dan struktur unit kerja,
- Kebijakan, regulasi, dan program kerja pembiayaan infrastruktur,
- Informasi publik terkait layanan, termasuk mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),
- Data pendukung dan publikasi,
- Layanan pengaduan serta permohonan informasi publik.

Seluruh data dan informasi yang tersedia di website diperbaharui secara berkala maupun sesuai kebutuhan, sebagai wujud komitmen DJPI dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### Website



Selain melalui website, DJPI juga memanfaatkan berbagai **media sosial resmi** sebagai sarana penyebaran informasi dan interaksi dengan masyarakat, antara lain:

- **Instagram:** [@pu\\_djpi](#)
- **X (Twitter):** [@ pu\\_djpi](#)
- **TikTok:** [@pu\\_djpi](#)
- **Facebook:** [Pembiayaan Infrastruktur PU](#)
- **YouTube Channel:** [@pu\\_djpi](#)

Pemanfaatan media sosial ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat interaksi publik terhadap program dan layanan DJPI.

Selain itu, setiap bulan Tim Komunikasi Publik DJPI secara rutin mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan timeline dan strategi pengelolaan media sosial, termasuk penyusunan materi publikasi yang menampilkan capaian dan kinerja masing-masing unit kerja. Rapat ini dihadiri oleh Penanggung Jawab (PIC) dari setiap unit kerja guna memastikan keselarasan pesan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik.

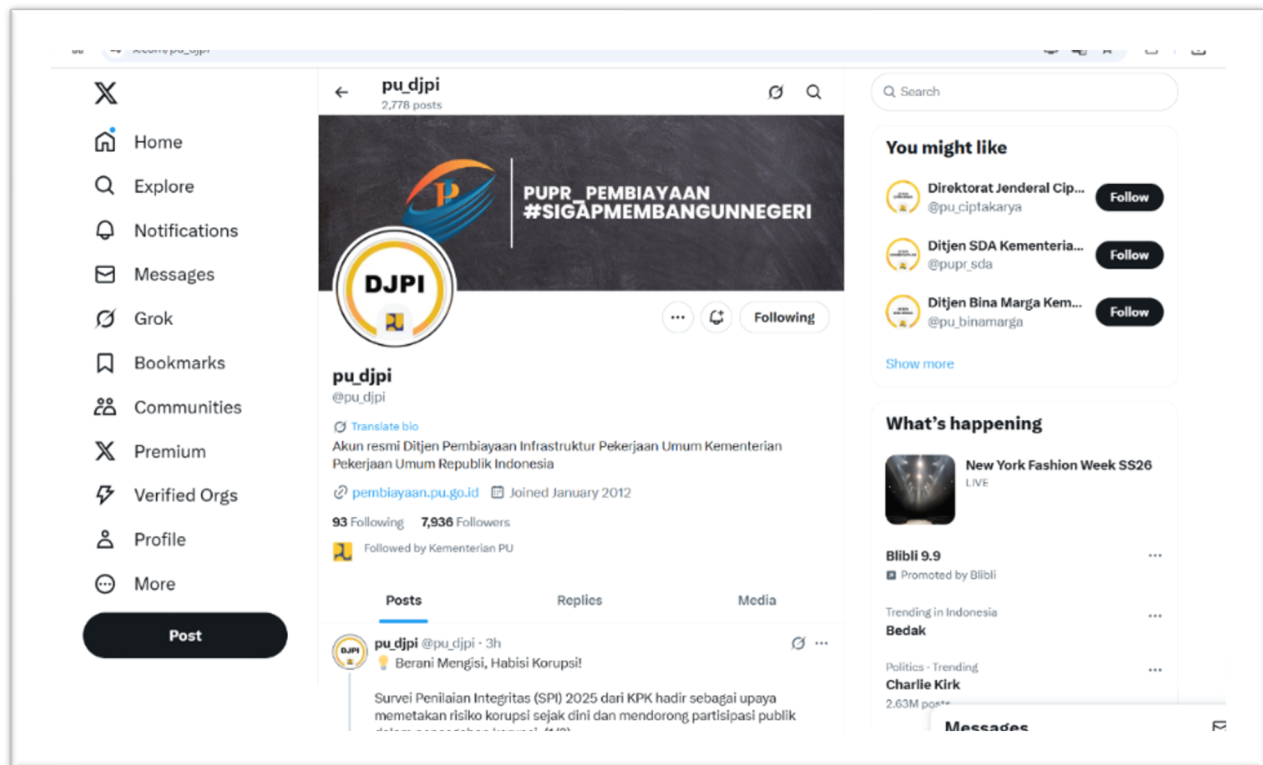
UPDATE AGENDA HARIAN KOMPU BHKP 21 MARET-8 APRIL 2025

Hari/Tanggal	Materi Konten	Status	PIC Penanggung Jawab
Jumat/21 Maret	1. Hari Hutan 2. Repost Proyek Tanggul Laut	Final Posted	Caca/Anton
Sabtu/22 Maret	1. Hari Air 2. Dok. PKS SitinjauLauik	Final Posted	Caca/Anton
Minggu/23 Maret	Edukasi Mudik	Final Posted	Caca/Anton
Senin/24 Maret	Video SitinjauLauik	Final Posted	Caca
Selasa/25 Maret	Repost Kemen PU	Final Posted	Caca
Rabu/26 Maret	SPAM Jatuhur	On Progress	Anton
Kamis/27 Maret	Mudik Tenang Menyenangkan	Final Posted	Anton
Jumat/28 Maret	Mudik Aman Menyenangkan	Final Posted	Mita
Sabtu/29 Maret	Hari Raya Nyepi	On Progress/Fahmi	Dwi
Minggu/30 Maret	Kesiapsiagaan Bencana	On Progress/Mbak Sri	Mbak Sri
Senin/31 Maret	Ucapan Idul Fitri	Fahmi	Komar
Selasa/1 April	Laporan arus mudik		Fahmi
Rabu/2 April	Testimoni keg sehabis mudik 1		Sopan
Kamis/3 April	Testimoni keg sehabis mudik 1		Pak Cipta
Jumat/4 April	Kelancaran Lalu Lintas 1		Esa
Sabtu/5 April	Kelancaran Lalu Lintas 2		Anton
Minggu/6 April	Laporan Arus Balik 1		Caca
Senin/7 April	Laporan Arus Balik 2		Mita
Selasa/8 April	Konten substansi		Komar

Timeline Media Sosial DJPI Bulan Maret Tahun 2025

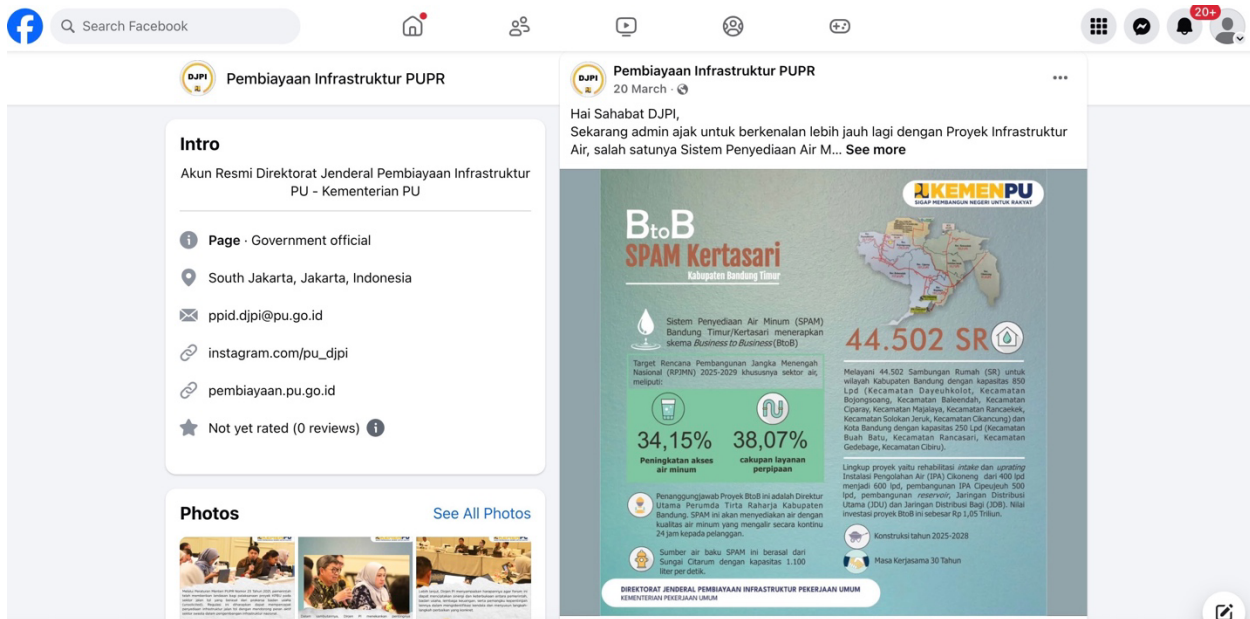


Instagram DJPI

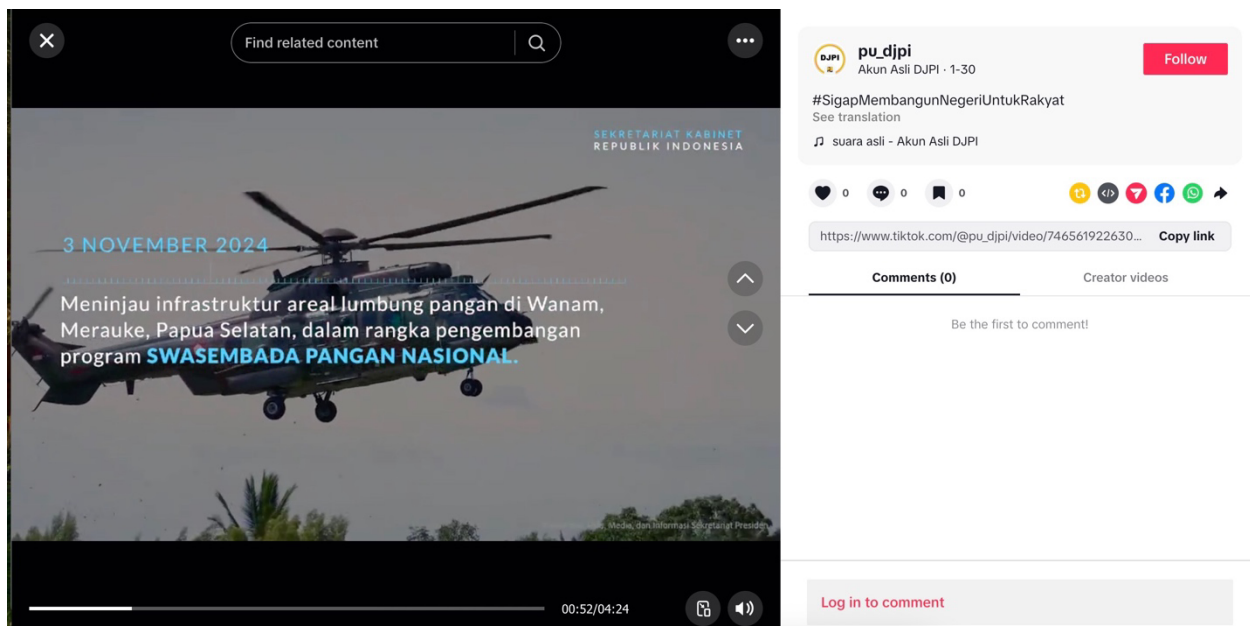


X DJPI





Facebook DJPI



Tiktok DJPI



## DJPI | HIRES 7 100 HARI SEMANGAT MEMBANGUN NEGERI



Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pek...  
770 subscriber

Subscribe



0



Bagikan



Download



96 x ditonton 8 bulan yang lalu

Tidak ada deskripsi yang ditambahkan ke video ini.

Youtube DJPI

## 2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

### Laporan Layanan Informasi Triwulan I Tahun 2025

1. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui aplikasi SP4N-LAPOR tidak terdapat penerimaan pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Januari	0	0	0
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	0	0	0

2. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui media sosial sebanyak dua pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Januari	0	0	0
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	2	0	2

3. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui datang langsung/persuratan sebanyak satu pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Januari	0	0	0
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	1	0	1

4. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui E-mail tidak terdapat penerimaan pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Januari	0	0	0
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	0	0	0

Seluruh pengaduan dan permohonan informasi yang masuk ke DJPI telah dikelompokkan berdasarkan unit kerja terkait, guna mempermudah proses tindak lanjut dan evaluasi pelayanan. Rincian klasifikasi pengaduan maupun permohonan informasi per unit kerja adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pengaduan	Jenis Pengaduan
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0	-
2.	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	2	Informasi Umum KPBU dan Informasi Penelitian tesis terkait KPBU
3.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Sumber Daya Air	0	-
4.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Bina Marga	1	Informasi KPBU
5.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Cipta Karya	0	-

## 2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik dilakukan dengan klasifikasi sesuai ketentuan, yaitu:

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala  
di Kementerian Pekerjaan Umum

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>UMUM</b>								
<u>Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA</u>								
1	Seluruh Unit organisasi	Profil Unit Kerja	Seluruh unit eselon II	Seluruh unit eselon II	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy dan Hardcopy	5 tahun	
2	Seluruh Unit organisasi	Daftar Pejabat Struktural dan/ atau fungsional	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan, di Jakarta	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	
3	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Setiap tahun, Jakarta	Softcopy dan Hardcopy	2 tahun	
4	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (E-Procurement)	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Berkala, Jakarta	Softcopy	2 tahun	



NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>UMUM</b>								
<b>Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA</b>								
5	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Audited)	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	5 tahun	
6	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan laporan akses (pelayanan) informasi publik	Biro Komunikasi Publik dan Pelaksana PPID	Biro Komunikasi Publik dan Pelaksana PPID	Setiap enam bulan sekali, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	2 tahun	
7	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang agenda kegiatan Kementerian yang telah, sedang dan akan dijalankan	Masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan agenda kegiatan, di Jakarta	Softcopy/ Hardcopy	2 tahun	
8	Seluruh Unit organisasi	Publikasi dan dokumentasi kegiatan bidang PUPR (Jurnal, Buletin, brosur, pemberitaan website, press release)	Masing-masing unit organisasi/UPT	Masing-masing unit organisasi/UPT	Setiap ada kegiatan dan tempat menyesuaikan	Softcopy	1 tahun	
9	Seluruh Unit organisasi	Program-program prioritas lingkup Kementerian PUPR	Masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	5 tahun	

**Informasi yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian Pekerjaan Umum**

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>UMUM</b>								
<b>Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT</b>								
10	Seluruh Unit organisasi	Agenda Kerja Pimpinan dan Pejabat Eselon I	Sekretariat masing-masing unit organisasi	Sekretariat masing-masing unit organisasi	Apabila ada perubahan, Jakarta	Hardcopy	1 tahun	
11	Seluruh Unit Organisasi	Informasi statistik organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	Setiap tahun, Jakarta	Hardcopy / Softcopy	5 tahun	
12	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang tata cara/prosedur pelayanan publik	Unit organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik	Unit organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik	Apabila ada perubahan, Jakarta	Hardcopy/ Softcopy	Selama masa berlaku	
13	Seluruh Unit organisasi	Daftar dan dokumen Kesepakatan Bersama/MoU	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Waktu dan tempat menyesuaikan kesepakatan tersebut	Hardcopy	Selama masa kesepakatan/MoU berlaku	
14	Seluruh Unit organisasi	Profil infrastruktur bidang PUPR	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Menyesuaikan dengan lokasi infrastruktur	Softcopy/ Hardcopy	Sepanjang infrastruktur masih berfungsi	
15	Seluruh Unit organisasi	Laporan Barang Milik Negara	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	5 tahun	
16	Seluruh Unit organisasi	Standar Operasional, Prosedur kerja lingkup Kementerian PUPR	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	Selama masa berlaku	

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala  
di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PI

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KHUSUS</b>								
<b>Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA</b>								
17	<b>DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>	Pipeline proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bidang infrastruktur PUPR	Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP	Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP	Setiap ada perubahan, Jakarta	Hardcopy, Softcopy	5 tahun	
18		Profil proyek KPBU seluruh sektor, meliputi: - Penanggung Jawab Proyek - Skema Kerja Sama - Masa Kerja Sama - Pengembalian Investasi - IRR - NPV - Struktur Proyek - Timeline pelaksanaan proyek	Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP	Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP	Setiap ada perubahan, Jakarta	Hardcopy, Softcopy	6 tahun	
19		Informasi Umum Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 tahun	
20		Data Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dilakukan perbaharuan data minimal seminggu sekali	Softcopy	Sampai terbit laporan realisasi berikutnya	
21		Data Realisasi Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dilakukan perbaharuan data minimal seminggu sekali	Softcopy	Sampai terbit laporan realisasi berikutnya	

Informasi yang wajib tersedia setiap saat  
di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PI

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KHUSUS</b>								
<b>Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT</b>								
22	<b>DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>	Informasi Publik terkait Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) - Nama Pengembang Perumahan - Asosiasi tempat Pengembang Perumahan tersebut bernaung - Alamat Pengembang Perumahan - Status Pengembang Perumahan (Terdaftar/Tidak Terdaftar di SIRENG)	Direktorat PSSPP	Subdirektorat Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan	Perbaharuan data setiap saat di aplikasi	Tampilan data Pengembang di aplikasi SIRENG	Per Tahun	
23		Informasi Publik Simpul KPBU - Jumlah Data Proyek KPBU meliputi Penyediaan s/d Konstruksi dan Operasi - Informasi terkait profil proyek KPBU beserta data teknisnya	Direktorat PSSPP	Subdirektorat Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan dan Subdirektorat Kepatuhan Intern	Perbaharuan data setiap saat di aplikasi	Informasi dan Data Teknis yang ditampilkan di Website SIMPUL KPBU	Per Tahun	

## 2.5 Kondisi Ruang Layanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) terus berupaya menciptakan dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga output akhirnya dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan menyediakan Ruang Layanan Informasi Publik secara langsung yang berada di kantor DJPI dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, dan pelayanan konsultasi.

Unit Layanan Informasi Publik nantinya bermanfaat dalam memberikan dan membantu para pemohon atau pihak-pihak berkepentingan dalam mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan profesional.



Booth DJPI

Gambar di atas merupakan booth Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Booth ini merupakan tampilan sebelumnya, sebelum dilakukan pembaruan desain dan peningkatan fasilitas layanan informasi publik. Pembaruan dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kenyamanan, aksesibilitas, dan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat.

## 2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi publik DJPI berinovasi dengan membuat suatu sistem penanganan pengaduan terpadu yang melibatkan PIC disetiap unit kerja melalui PPID DJPI:

<https://pembiayaan.pu.go.id/pelayananppid/b4ck3nd/>

No	No Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Jenis Informasi	Nama Lengkap	NIK	Email	Aksi
1	0001/PPID/DUP/PI/IX/2025	09 September 2025	KPRU	dr. fadly	123456789012222	topatbandung@gmail.com	• 🔍
2	0002/PPID/DUP/PI/VII/2025	21 Agustus 2025	KPRU Bina Marga	Faqih	3175091210950005	faqih@toyotastusho.co.id	• 🔍
3	0003/PPID/DUP/PI/VII/2025	04 Agustus 2025	KPRU	Gita Nurita	320107110910001	gita.nuritagasmotor.com	• 🔍
4	0003/PPID/DUP/PI/VII/2025	31 Juli 2025	KPRU	Pandu Bagas Pektari	3271022606980004	pandubp.mccindonesia@gmail.com	• 🔍
5	0002/PPID/DUP/PI/VII/2025	29 Juli 2025	Jatbung API	Pedro A Umbu Yewang, S.Ak	531215101010001	pedroyewang42@gmail.com	• 🔍
6	0004/PPID/DUP/PI/II/2025	21 Juli 2025	KPRU	Haris Sumarta	3507172806870001	haris.sumarta.kam@gmail.com	• 🔍
7	0003/PPID/DUP/PI/V/2025	19 Mei 2025	Jatbung API	Hikmatul Azzah	35100620690001	hikmatulhi@gmail.com	• 🔍
8	0004/PPID/DUP/PI/II/2025	11 Maret 2025	KPRU	Supratman	3172032001640004	pratman6@gmail.com	• 🔍
9	0003/PPID/DUP/PI/III/2025	11 Maret 2025	KPRU	ar jali	3275011309040005	jaliul.fayyadhunadlat22@mhaw.pnj.ac.id	• 🔍
10	0003/PPID/DUP/PI/II/2025	04 Maret 2025	KPRU	Ranny Dwiputri Maharani	3273305101070001	rannydm@gmail.com	• 🔍

### *Dashboard* Pengaduan

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, telah dilakukan serangkaian perubahan dan perbaikan sistematis. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

#### 1. Digitalisasi Rekapitulasi Data

Sebelumnya, rekapitulasi data pemohon beserta dokumen pendukung masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidakteraturan data. Kini, seluruh data telah terdokumentasi secara digital dalam *dashboard layanan*, sehingga memudahkan pelacakan dan pengarsipan informasi.

#### 2. Integrasi Layanan Pengaduan dan Permohonan Informasi

Sebelumnya, penanganan pengaduan dan permohonan informasi dilakukan secara terpisah dari berbagai kanal. Kini, layanan tersebut telah terintegrasi melalui satu *dashboard layanan*, yang memungkinkan penanganan lebih cepat, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik.

#### 3. Pemantauan Batas Waktu Layanan

Pada tahap awal, monitoring terhadap batas waktu pelayanan dilakukan secara manual. Kini, setiap pengaduan dan permohonan informasi sudah termonitor otomatis melalui *dashboard pengaduan*, sehingga meminimalkan potensi keterlambatan.



#### 4. **Penetapan Penanggung Jawab (PIC)**

Dahulu belum terdapat penanggung jawab yang jelas dari setiap unit kerja terkait pengelolaan pengaduan dan permohonan informasi. Saat ini telah dibentuk *Penanggung Jawab (PIC)* di masing-masing unit kerja melalui **SK PIC Penanganan Pengaduan**, untuk memastikan tanggung jawab dan tindak lanjut berjalan efektif.

#### 5. **Penyusunan Tata Kelola dan SOP**

Sebelumnya belum tersedia tata kelola yang terintegrasi dalam penanganan pengaduan masyarakat. Kini, telah disusun **Proses Bisnis dan SOP Penanganan Pengaduan DJPI**, yang menjadi pedoman baku dalam pelaksanaan layanan tersebut.

#### 6. **Peningkatan Transparansi Informasi**

Sebelumnya, informasi terkait penanganan pengaduan dan permohonan informasi belum disampaikan secara transparan. Saat ini, sistem yang diterapkan memungkinkan penyajian informasi yang lebih terbuka kepada publik, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan publik.

### 2.7 **Survei Layanan Informasi Publik**

Pada Laporan Semester I Tahun 2025 setelah permohonan dapat diproses telah dilakukan survey melalui form yang dikirimkan langsung kepada pemohon untuk mempermudah melakukan penilaian sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan DJPI. Penilaian ini berdasarkan penilaian terhadap 9 unsur penilaian antara lain:

1. Unsur tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya,
2. Unsur tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini,
3. Unsur tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan,
4. Unsur tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan,
5. Unsur tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan,
6. Unsur tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan,
7. Unsur tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan,
8. Unsur tentang kualitas sarana dan prasarana
9. Unsur tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. Yang menjadi acuan dalam standar layanan informasi publik di DJPI

1	Unsur	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
2	Total Nilai Persepsi	79	79	80	81	81	80	82	80	85
3	IKM	3.29	3.29	3.33	3.38	3.38	3.33	3.42	3.33	3.54
4	Konversi Nilai IKM	82.29	82.29	83.33	84.38	84.38	83.33	85.42	83.33	88.54
5	Mutu Pelayanan	B	B	B	B	B	B	B	B	A
6	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
7										
8	NILAI SKM UPT	84.1435185								
9	MUTU PELAYANAN	B								
10	KINERJA UNIT PELAYANAN	Baik								
11										
12	Keterangan									
13	U1	Unsur tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya								
14	U2	Unsur tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini								
15	U3	Unsur tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan								
16	U4	Unsur tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan								
17	U5	Unsur tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan								
18	U6	Unsur tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan								
19	U7	Unsur tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan								
20	U8	Unsur tentang kualitas sarana dan prasarana								
21	U9	Unsur tentang penanganan pengaduan pengguna layanan								

### Perhitungan SKM

Berdasarkan data Indeks Kepuasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik DJPI pada Semester I hal ini masyarakat memberikan penilaian terhadap layanan informasi publik dengan nilai **BAIK** dengan mutu pelayanan B.

## **BAB III**

### **KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI**

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan DJPI pada prinsipnya telah berjalan, namun masih terdapat berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut atas Kendala tersebut antara lain:

#### **3.1 Kendala Layanan Informasi Lingkup Unit Organisasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum**

Sebagai badan publik yang memiliki tugas dan fungsi dapat menyelenggarakan pelayanan informasi dengan baik. Namun sebagai unit organisasi dengan tugas menangani:

1. Dalam pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana DJPI masih menerima pengaduan yang terkait Pembiayaan perumahan namun hal ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Perlu dilakukannya pemutakhiran DIK dan DIP DJPI dengan nomenklatur terbaru karena saat ini sudah tidak lagi menangani terkait Pembiayaan perumahan.
3. Perlu adanya kebijakan yang mengatur layanan yang terintegrasi antar unit kerja, mengingat saat ini setiap unit kerja telah melakukan pencairan ZI jadi dan memiliki layanan sehingga dapat dibuat layanan yang terintegrasi

#### **3.2 Kendala dalam Layanan Informasi Lingkup Unit Kerja**

1. Dalam pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana DJPI melibatkan unit kerja sebagai anggota sekretariat pelaksana guna mendukung pelaksanaannya. Namun demikian saat ini penugasan terkait pelaksanaan regulasi dan standar operasional prosedur belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten.
2. Partisipasi aktif dari unit kerja dalam pemenuhan layanan informasi publik belum maksimal.
3. Sosialisasi dan diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima masih terbatas.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI**

Dalam rangka peningkatan layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dapat melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut antara lain:

#### **4.1 Rekomendasi**

1. Memperkuat koordinasi antar unit kerja untuk mengantisipasi penanganan pengaduan masyarakat yang berada di luar kewenangan DJPI seperti misalnya kewenangan Unor lain.
2. Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Kegiatan (DIK) serta Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai nomenklatur dan tugas fungsi terkini agar informasi yang disampaikan tetap relevan.
3. Menyusun kebijakan internal serta mengembangkan sistem layanan informasi yang terintegrasi antar unit kerja dalam mendukung pelaksanaan Zona Integritas dan pelayanan prima.
4. Mengoptimalkan keterlibatan unit kerja dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik melalui penugasan yang jelas dan koordinasi yang berkesinambungan.
5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik di seluruh unit kerja dalam bentuk SOP Makro dan Mikro
6. Memperluas kegiatan sosialisasi dan diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh pegawai dan masyarakat.

#### **4.2 Tindak Lanjut**

1. Meningkatkan Publikasi kanal layanan publik untuk memastikan penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan DJPI.
2. Melakukan pemutakhiran DIK dan DIP secara berkala serta melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dengan struktur organisasi terbaru berkoordinasi dengan Biro Komunikasi Publik.
3. Menyusun Standar layanan informasi publik yang terintegrasi antar unit kerja serta mengembangkan sistem digital terpadu untuk pengelolaan informasi melalui dashboard layanan dan website DJPI.
4. Menetapkan surat tugas dan uraian tugas bagi anggota sekretariat pelaksana PPID dari tiap unit kerja guna memperjelas tanggung jawab dan peran.



5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pelatihan rutin untuk memastikan konsistensi penerapan SOP dan peningkatan kompetensi petugas layanan informasi publik.
6. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta komitmen unit kerja terhadap keterbukaan informasi publik.